

Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Teguh Imam Rahayu

teguhimamr.01@gmail.com

Abstract

Selama ini, sudah banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, tetapi semuanya tidak membawa dampak yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Diantara program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang kemudian pada Tahun 2008 berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung sudah berjalan 6 tahun, dan tahun 2013 ini memasuki tahun yang keenam. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dari program PNPM di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak apakah sudah berdampak terhadap perubahan perekonomian yang ada pada masyarakat perdesaan sebagaimana tujuan utama program PNPM itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif karena bermaksud untuk memberikan gambaran fenomena yang terjadi dengan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. pendekatan penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, artinya data yang diambil adalah data yang tidak berbentuk angka, sehingga dalam melakukan analisis data dengan melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. dan teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil subyek atas dasar strata, random atau area dengan tujuan mendapatkan informasi yang terbanyak atau tujuan tertentu, sehingga bukan untuk memudahkan generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui:1). Bahwa Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak memberikan dampak nyata dan perubahan kehidupan yang ada di masyarakat perdesaan, baik yang pengguna manfaat langsung maupun yang tidak langsung. 2). Perubahan yang dapat dilihat dari program PNPM antara lain : pembangunan fisik yang selama ini tidak mampu dibiayai oleh pemerintah desa dapat terealisasi sesuai dengan keinginan masyarakat, adanya pelatihan ketrampilan dan pinjaman modal melalui SPP dari biaya program PNPM. 3). Faktor-Faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, anantara lain : faktor SDM, faktor alam dan faktor tingkat kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung jalannya program PNPM tersebut.

Keyword: Implikasi, Program PNPM, Perubahan Perekonomian

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan memang menjadi tema yang sentral dan telah menjadi agenda internasional dari lembaga-lembaga dunia. Untuk itu, mereka telah mengucurkan dana dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi dalam perjalanannya, sering sekali dana yang seharusnya dipakai dalam mengatasi masalah kemiskinan, ternyata jatuh ketangantangan yang tak semestinya. Karena itulah barangkali kemudian Bank Dunia membekukan lebih dari 1 miliar dolar AS dana bantuan Bank Dunia ke beberapa negara karena melakukan praktek korupsi.

Kemiskinan memang suatu simbol yang tentunya sangat memalukan. Katakanlah banyaknya praktek perjudian, penyeludupan, prositusi dan berbagai tindakan anakhis lainnya. Kesemunya itu menjadi beban baru yang harus ditanggung republik ini. Kemiskinan pula yang menjadi faktor penyumbang bagi bertambahnya angka pengangguran di negara ini. Bisa dibayangkan, betapa sengitnya jika satu lowongan kerja diperebutkan sekitar dua puluh ribu pengangguran.

Tentu kita tidak dapat memaklumi masalah ini. Bagaimana tidak, problema kemiskinan dan pengangguran dapat menjadi bom waktu, yang setiap saat bisa memunculkan masalah sosial yang amat dahsyat. Katakanlah misalnya, akan semakin tingginya tingkat kriminalitas. Karena itu,

bagaimanapun problema ini harus dituntaskan sedini mungkin. Diperlukan langkah yang secara simultan dalam menanggulangi kedua problema ini. Langkah-langkah tersebut dapat dimulai dengan mengintegrasikan target dan program ke dalam rencana yang lebih sederhana dan singkat. Kemudian kita perlu jujur dan cerdas dalam menjalankan setiap program yang sudah kita rencanakan.

Pengalokasian dana bagi pemberantasan kemiskinan harus diiringi dengan komitmen penuh dalam menjalankan setiap rencana tanpa mengalihkan dana-dana tersebut ke kantong pribadi. Dalam posisi inilah pengawasan yang efektif agar dana yang ada benar-benar terpakai sesuai dengan peruntukannya. Kemudian anggaran juga harus disusun secara rapi, tepat, dan jujur dan sebisa mungkin harus dihindari dari bentuk-bentuk penyelewengan. Akses bagi daerah-daerah tertinggal harus dibuka. Kita patut bersyukur bahwa ada banyak lembaga internasional, seperti Bank Dunia, mau membantu kita dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karena itu, mari kita menjaga kebaikan mereka dengan tidak mengorupsi dana bantuan itu.

Program yang telah dilakukan oleh pemerintah, selama ini, sudah banyak, dalam rangka menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, tetapi semuanya tidak membawa dampak yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebut saja misalnya, Impres Desa Tertinggal (IDT), program Jaring Pengaman

Sosial (JPS) yang digulirkan ketika krisis moneter menerpa bangsa ini pada pertengahan tahun 1997. Sekarang kita mengenal istilah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikerjakan dengan membagi-bagikan uang sebanyak Rp100.000 per bulan per keluarga miskin dan program-program pemerintah lainnya yang berupa Bantuan Sosial (Bansos) yang dilewatkan melalui beberapa Departemen, baik Departemen Sosial, Departemen Koperasi, Departemen Pertanian, dan masih banyak lagi yang tujuan utamanya satu adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, diantaranya, adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang kemudian pada Tahun 2008 berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebelumnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah dan sedang berjalan. Integrasi dilakukan dengan menggabungkan program yang telah terbukti efektif,

yaitu : PPK di wilayah perdesaan dan PNPM di wilayah perkotaan.

Hal ini sesuai dengan kutipan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2006, yaitu ”*Seperti telah saya kemukakan, menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan sasaran jangka menengah hingga 2009, kita tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun juga memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada penduduk miskin....., upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di daerah perdesaan dan perkotaan*”

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan dibiayai dari Dana Bank Dunia (Word Bank) yang alokasi dananya per Kecamatan sebesar antara 1 Milyar s/d 3 Milyar. Secara umum tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Adapun jenis kegiatan yang dibiayai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan antara lain :1). Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). 2).

Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal). 3). Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk penambahan modal). 4). Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Berdasarkan jenis-jenis kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan tersebut, maka setiap desa diperbolehkan untuk membuat 3 (tiga) jenis proposal yang kemudian dikompetisikan melalui rapat di tingkat kecamatan (Musyawarah Antar Desa). Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan ini sejak tahun 2008, dan tahun 2013 ini telah memasuki tahun ke-6.

Pada tahun pertama, Kecamatan Sayung mendapatkan dana 1 Milyar untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Sayung. Dana 1 Milyar tersebut diperebutkan oleh 20 (dua puluh) Desa yang ada di Kecamatan Sayung untuk mendapatkan dana tersebut melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Sehingga dana tersebut telah terdistribusikan sesuai dengan peringkat dari masing-masing desa.

Pada tahun kedua, Kecamatan Sayung mendapatkan dana dari pemerintah pusat sebesar 1.5 Milyar,

dengan proses yang sama dengan tahun yang pertama, sehingga dana tersebut telah terdistribusikan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Sayung sesuai dengan peringkat yang diperolehnya.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah setelah dana tersebut terdistribusikan ke desa-desa dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan proposal yang telah diajukan sudah dapat merubah perilaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari data yang ada di Kecamatan Sayung, semua desa yang telah mendapatkan kucuran dana telah melaksanakan kegiatannya dengan baik. Hal ini terbukti dari laporan pertanggungjawaban yang mereka laporkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung sudah berjalan 6 tahun, dan tahun 2013 ini memasuki tahun yang keenam. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dari program PNPM di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak apakah sudah berdampak terhadap perubahan perekonomian yang ada pada masyarakat perdesaan sebagaimana tujuan utama program PNPM itu sendiri.

Rumusan Masalah yang dikaji tentang Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

”Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?”. “Sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap Perubahan Perekonomian Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?”. “Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?”

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Gambaran umum Lapangan Usaha Masyarakat, lapangan usaha penduduk Kecamatan Sayung meliputi : sektor pertanian, peternakan, perikanan, nelayan, buruh pabrik, dan yang lainnya adalah sebagai guru, PNS dan TNI. Dari berbagai jenis lapangan usaha penduduk tersebut di atas, mayoritas penduduk Kecamatan Sayung bekerja pada sektor industri. Sehingga apabila kondisi perekonomian negara sedang goyang, maka banyak industri yang ada di sekitar Sayung dan Semarang juga terancam bangkrut, sehingga banyak karyawan yang di PHK. Sehingga perlu adanya kegiatan-

kegiatan lain yang dapat menunjang perekonomian masyarakat di Kecamatan Sayung selain pekerjaan pokok mereka.

Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Sayung Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Sayung sejak Tahun 2008 dan saat ini telah memasuki Tahap Mandiri dengan total dana yang diterima kurang lebih sekitar 6 Milyar dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Prasarana Wilayah yang berupa dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada masyarakat kelurahan penerima yang pengelolaanya dipercayakan ke organisasi masyarakat yang dibentuk secara demokratis dan transparan yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Adapun beberapa hal yang dibiayai oleh BLM adalah sbb: Hibah, penggunaan dana hibah tersebut hanya untuk kegiatan yang benar– benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi kepentingan serta kebutuhan riil masyarakat langsung yaitu hibah untuk pembangunan pelayanan prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman, hibah yang sifatnya untuk membangun kapasitas dan daya saing kelompok masyarakat miskin dalam hal ini pelatihan–pelatihan, hibah untuk santunan fakir miskin, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lain. Pinjaman (kredit mikro), yaitu: pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk usaha produktif termasuk kredit mikro perumahan atau perbaikan rumah dan

atau perbaikan ketrampilan yang langsung terkait dengan kegiatan usaha tersebut dengan batas pinjaman pertama kali Rp. 500. 000, 00 dan maksimal pinjaman 2 juta rupiah.

Implementasi PNPM di Kecamatan Sayung tersebut ada beberapa tahapan penting yang dilalui, prosesnya meliputi: Sosialisasi PNPM, merupakan tahapan memperkenalkan proyek kepada warga setempat oleh Tim Fasilitator Proyek, meliputi materi: tujuan proyek, sasaran, pelaksana dan bagaimana gambaran pelaksanaannya secara umum.

Kontrak Sosial, merupakan tahapan dalam usaha menciptakan kesepakatan adanya proyek di wilayah tersebut antar warga dengan fasilitator proyek setelah proyek tersebut disepakati oleh warga setempat. Pembentukan kader, merupakan tahapan untuk mencari dan menerima kader yang secara sukarela membantu implementasi PNPM di wilayah tersebut yang pada prinsipnya orang tersebut tidak di bayar.

2.2. Hasil Penelitian

Pemetaan, merupakan tahapan dalam implementasi proyek PNPM dalam rangka melakukan pengelompokan warga yang berjumlah antara 25–35 berdasarkan RT/ RW untuk mereflesikan masalah kemiskinan, kriteria kemiskinan dan mencari solusinya serta untuk merumuskan organisasi swadaya masyarakat yang ideal bagi pelaksanaan PNPM tersebut. Penyusunan Proyek Jangka Menengah (PJM) serta Proyek

Tahunan Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat Setempat (PJM Pronakis dan Proyek Tahunan), meliputi, (1) PJM Pronakis (3 tahun), menentukan proyek jangka menengah penanggulangan kemiskinan setempat, (2) Proyek tahunan (1 tahun) merupakan rumusan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun pertama (rencana investasi dengan dana BLM), klasifikasi dan kesepakatan. Rapat Warga Terbuka (RWT), merupakan tahapan dalam implementasi yang berupa pertemuan warga dalam rangka membuat AD/ ART sebagai pedoman dalam pelaksanaan PNPM di wilayah setempat.

Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), merupakan tahapan dalam implementasi PNPM berupa pembentukan organisasi pelaksana PNPM yang berasal dari warga, oleh warga dan untuk warga. BAPPUK, merupakan tahapan dalam implementasi untuk menentukan prioritas kegiatan PNPM di wilayah setempat. Realisasi, merupakan tahapan dalam implementasi PNPM dimana rencana– rencana yang telah di sepakati di realisasikan dalam bentuk kegiatan–kegiatan proyek. Berdasarkan hasil rapat UPK disepakati beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan implementasi PNPM di Kecamatan Sayung, yaitu:

- a) Pembayaran Tahap I (20%) dilakukan setelah SPPB ini ditandatangani.
- b) Pembayaran Tahap II (50 %) dilakukan apabila: Sekurang-kurangnya 95% dana tahap I telah

dimanfaatkan, Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah diverifikasi KMW dan PJOK, Telah disetujui Proposal kegiatan KSM/ Panitia untuk penyerapan dana tahap II, dan telah direkomendasikan KMW untuk memperoleh pembayaran tahap II Pembayaran tahap II dilakukan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah penandatanganan SPPB ini;

- c) Pembayaran Tahap III (30% atau yang tersisa) dilakukan apabila pihak kedua telah mampu menunjukkan potensi keberlanjutan dana, kelembagaan dan kegiatannya, dengan indikator menunjukkan kesanggupan pengoperasian, pemeliharaan dan pelestarian kegiatan-kegiatan hibah dengan baik, serta telah mampu mengelola kegiatan-kegiatan pinjaman bergulir, berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh KMW serta pihak kedua telah melakukan audit independen dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat. Pembayaran tahap III dilakukan minimal 6 bulan setelah pembayaran dana BLM tahap II.

PNPM diselenggarakan di Kecamatan Sayung, TPK di desa setempat mendapat alokasi dana operasional awal dari UPK sebesar 5% dari total dana BLM sebesar Rp. 100 juta sesuai tertera dalam Pedoman Umum PNPM. Berikut ini salah satu contoh kegiatan PNPM di Kecamatan Sayung yang diprioritaskan pada kegiatan fisik dan sosial, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Dari tabel tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan bahwa alokasi dana PNPM sebanyak Rp. 872.990.000,00 digunakan untuk kegiatan yang sifatnya fisik dan sarana sosial. Dana untuk kegiatan fisik digunakan untuk pembangunan fisik yang berupa betonisasi jalan terdapat di Desa Loireng, Desa Pilangsari, Desa Bulusari, Desa Prampelan, Desa Sriwulan dan Desa Sayung, sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial berupa kegiatan sarana social terdapat di Desa Tambakroto, dan Desa Kalisari.

Namun demikian ada hal yang perlu dicatat berdasarkan penuturan dari fasilitator dan anggota UPK yaitu untuk kegiatan PNPM yang sifatnya fisik terdapat lokasi yang seharusnya tidak dibangun kegiatan fisik, tetapi dibangun kegiatan fisik. Lokasinya merupakan daerah perumahan yang sebagian besar masyarakatnya lebih kaya bila dibandingkan dengan lokasi yang sebagian besar masyarakatnya miskin. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan fisik ternyata partisipasi aktif warga desa yang lain masih kurang, terlihat dari kegiatan fisik PNPM perbaikan jalan di beberapa desa yang mendapatkan bantuan fisik berupa betonisasi jalan dan pembangunan sarana sosial.

Kegiatan implementasi PNPM PJM II dialokasikan dana PNPM sebesar Rp. 50.000.000, untuk kegiatan ekonomi produktif yang berupa pinjaman kredit mikro secara bergulir bagi masyarakat miskin yang terbagi dalam 26 KSM atau 124 warga miskin/kk penerima. Ternyata desa yang sebenarnya wilayah daerah perumahan

mendapatkan bantuan ekonomi produktif PJM II untuk 31 warga/ KK yang terbagi dalam 5 KSM. Untuk realisasi kegiatan ekonomi produktif dalam implementasinya berdasarkan penuturan dari warga mengalami kendala karena adanya persyaratan yang memberatkan yang berupa surat keterangan warga miskin, surat keterangan tidak punya usaha atau punya usaha dan surat pernyataan kesanggupan melunasi serta surat pernyataan tanggung renteng, dimana untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut calon penerima bantuan PNPM harus mengurusnya yang memerlukan waktu yang tidak singkat dengan mendatangi/ menunggu tim survai dan juga harus mengumpulkan calon anggotanya meminta kepastian kesepakatan tanggung renteng.

Kondisi-kondisi lainnya menyangkut implementasi PNPM adalah adanya Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pelaksana PNPM yang kinerjanya kurang maksimal. Kondisi tersebut ditandai adanya kekurangaktifan sebagian besar anggota UPK, dari 6 anggota UPK yang aktif hanya sekitar 4 anggota saja dan koordinator UPK-pun selaku pihak yang disertai tugas untuk mengkoordinir implementasi PNPM berdasarkan informasi keaktifannya dinilai masih kurang. Penyebab dari ketidakaktifan tersebut terjadi karena munculnya persepsi bahwa mereka beranggapan kerjanya sangat berat akan tetapi imbalanya dapat dikatakan sangat minim dan mereka tidak diperkenankan untuk pinjam kegiatan ekonomi produktif serta mereka tidak suka pada mekanisme

prosedural yang rumit mengenai mekanisme pencairan dana PNPM dan pembuatan laporan serta adanya ketakutan dari sebagian besar anggota UPK untuk menanggung resiko bilamana nantinya ketika bertugas mendapatkan masalah yang berat.

Disamping permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain dalam implementasi PNPM berupa kurang maksimalnya sarana penyaluran aspirasi dimana Forum TPK yang seharusnya menjadi forum dalam pengambilan keputusan ditingkat perwakilan warga kelurahan dalam implementasi PNPM frekuensi pertemuannya tidak rutin tetapi hanya sewaktu-waktu yaitu dilaksanakan apabila diperlukan, hal ini terjadi karena adanya sebagian besar anggota UPK yang tidak aktif padahal dalam pedoman umum PNPM disebutkan adanya rapat koordinasi triwulan UPK, KSM dan masyarakat. Fenomena lain dalam implementasi PNPM adalah adanya kegiatan yang tidak diputuskan melalui Forum UPK. Sebagai suatu contoh kasus kredit ekonomi produktif penentuan prioritas masyarakat miskin yang berhak menerima kredit hanya ditentukan sebagian saja oleh anggota UPK tanpa melalui forum UPK padahal dalam menentukan siapa warga miskin yang berhak harus melalui forum UPK yang didasarkan pada kriteria tertentu.

2.3. Implikasi Program PNPM

Pelaksanaan program PNPM yang ada di Kecamatan Sayung memberikan dampak dan manfaat

yang sangat besar sekali terhadap masyarakat di Kecamatan sayung, baik manfaat yang langsung maupun manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa yang mendapatkan program tersebut, diantara dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah :

Pembangunan Jalan, jembatan dan tanggul-tanggul yang selama ini tidak dapat dibangun oleh pemerintah desa, dengan adanya program PNPM hal tersebut dapat dibangun dan terealisasi dengan baik. Adanya pelatihan-pelatihan ketrampilan, seperti menjahit, border, pembuatan roti dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberikan ketrampilan kepada masyarakat. Pemberian modal kerja melalui simpan pinjam khusus untuk perempuan yang dapat membantu para ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan tetapi tidak memiliki modal, maka dengan adanya pinjaman tersebut sangat membantu kepada masyarakat.

3. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Implikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak memberikan dampak nyata dan perubahan kehidupan yang ada di masyarakat perdesaan, baik yang poengguna manfaat langsung maupun yang tidak langsung. Perubahan yang dapat dilihat dari program PNPM antara lain : pembangunan fisik yang

selama ini tidak mampu dibiayai oleh pemerintah desa dapat terealisasi sesuai dengan keinginan masyarakat, adanya pelatihan ketrampilan dan pinjaman modal melalui SPP dari biaya program PNPM

Faktor-Faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, anatara lain : faktor SDM, faktor alam dan faktor tingkat kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung jalannya program PNPM tersebut.

Daftar Pustaka

- Bryant, Coraly dan White, Louise D, 1988, *Manajemen Pembangunan*, Terjemahan Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Ciptono, Fandy, 1997, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, Andi, Yogyakarta.
- Dun, William. N, 1992, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R, 1978, *Understanding Public Policy*, Pentice Policy, Pentice Hall, Englewod Cliff, New Jersey.
- Denhart, Robert, 1995, *Public Administration, Action and Orientation*, Wordwort Publizing Company, Belmont.
- Dwianto, Agus, 1999, *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan TMKR, MAP-UGM, Yogyakarta.

- Edwards, III George, 1980, *Implementing Public Policy*, Cogresional Quartely Press, N. W. Washington DC.
- Khairudin, 1992, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahrir, 1998, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor, Bandung.
- Siegel, Sidney, 1996, *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, gamedia, Jakarta.
- Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan V, Alfabeth, Bandung.
- Ghozali, Imam, 2002, *Statistik Non Parametrik*, Badan Peberbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumardi, Mulyanto dan Dieter, Ever Hans, 1982, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriatna, Tjahja, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Rajawali, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarnno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, MedPress, Yogyakarta.

Lampiran

Tabel 4. 1
KEGIATAN PNPM PJM I

N0	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi dan Volume	Nilai Usulan Kegiatan (Rp)	BLM PNPM (Rp)	Swadaya (Rp)
1	Betonisasi jalan/fisik	Desa Loireng, Desa Pilangsari, Desa Bulusari, Desa Prampelan, Desa Sriwulan dan Desa Sayung	400.750.000	360.675.000	40.075.000
2	Perbaikan saluran/fisik	Desa Gemulak, Desa Sidogemah, Desa Bedono, Desa Surodadi dan Desa Karangasem	360.350.000	324.315.000	36.035.000
3	Sarana Pendidikan/fisik	Desa Tambakroto, dan Desa Kalisari	120.000.000	108.000.000	12.000.000
4	Ketrampilan	Desa Loireng dan Desa Sayung	80.750.000	80.750.000	0
	Total		961.850.000	872.990.000	88.110.000

Sumber: Fasilitator PNPM, 2012